

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pemaparan bab-bab sebelumnya, maka dapat direduksi beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk Kebijakan Pemerintah Kabupaten Cilacap Untuk Penertiban Bengkel Umum

Bengkel umum yang semakin menjamur di Kabupaten Cilacap ini didasarkan atas semakin banyaknya pengendara kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Cilacap, dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap pada akhirnya membuka peluang bagi sebagian orang untuk membuka usaha dibidang bengkel demi memenuhi tuntutan kebutuhan pengendara motor. Dengan banyaknya bengkel umum ini kemudian membuat pemerintah Kabupaten cilacap untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penertiban penyelenggaraan bengkel umum di Kabupaten Cilacap.

Peraturan daerah tentang bengkel umum dibuat agar keberadaan bengkel umum dapat tertata dengan rapih, dan bengkel umum illegal dapat ditertibkan. Peraturan daerah tersebut akan dapat membantu dalam menjaga persaingan usaha karena perizinan bengkel umum dapat terkontrol sehingga konsumen yang ada dapat dilindungi oleh perda tersebut jika terjadi masalah dengan bengkel yang legal dan dapat diawasi

oleh pemerintah setempat. Selain itu dari peraturan daerah yang ada akan dapat menata keberadaan bengkel umum agar tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan lingkungan sekitar.

2. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam Penertiban Bengkel Umum

Implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 3 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika di Kabupaten Cilacap dan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap nomor 22 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap belum dapat dikatakan bisa efektif, hal ini karena dilihat dari masih banyaknya bengkel umum yang tidak berijin pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Cilacap. Tidak adanya dampak yang signifikan ini dipengaruhi oleh kurangnya kemampuan serta SDM dalam melaksanakan penertiban. Sehingga hal ini kemudian mengakibatkan implementasi kebijakan berjalan kurang maksimal.

Selain itu masih lemahnya fungsi pembinaan dan pengawasan sedikit banyak menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. tidak adanya pelibatan pihak lain juga turut memperparah kendala dalam implementasi kebijakan tersebut.

3. Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Kebijakan tentang Penyelenggaraan Bengkel Umum

Hambatan yang terjadi dalam waktu setahun ini adalah belum bisanya pemerintah untuk menyusuri setiap tempat di Cilacap dikarenakan faktor kondisi geografis Kabupaten Cilacap yang luas. Selain itu, kurangnya kemampuan sumber daya manusia yang ada turut menjadi hambatan dalam kebijakan tersebut.

B. SARAN

Penelitian yang dilakukan ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis memberikan masukan sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Kabupaten Cilacap

Melakukan penunjukkan dinas-dinas atau lembaga-lembaga lain guna mendampingi atau membantu Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

2. Untuk Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

Pembenahan dari segi sumber daya manusia diperlukan supaya dapat memaksimalkan lagi implementasi dari peraturan bupati terkait penertiban bengkel umum, masalah-masalah yang datang diharapkan dapat dijadikan sebagai kajian baru serta dipelajari lagi apa yang kurang serta melakukan komunikasi atau kerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait.

3. Untuk penelitian selanjutnya

Diharapkan dapat mengumpulkan data baik dari wawancara, dokumentasi, atau observasi lebih mendalam dan melakukan pengambilan sampel lebih luas lagi sehingga diharapkan dapat mengungkap fakta-fakta lebih dari yang ada dalam penelitian ini serta memperbaiki teori-teori yang ada dalam penelitian ini dengan teori-teori yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, S.Z. 2002. Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Budi Winarno. 2002. "Apakah Kebijakan Publik ?" dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Burhan Bungin 2003. Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Drs. Hessel Nogi S. Tangkilisan, M.Si. 2003. "Teori dan Konsep Kebijakan Publik" dalam Kebijakan Publik yang membumi, konsep, strategi dan kasus, Yogyakarta : Lukman Offset dan YPAPI.
- Dunn, William. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho Dwijowijoto. 2008. Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- HAW Widjaya. 2005. Penyelenggaraan otonomi di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- H.B. Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta : UNS Press
- Hadari Nawawi. 2002. Penelitian Terapan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Hanif Nurcholis. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Grasindo
- Michael Howlett dan Ramesh. 1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*, Toronto: Oxford University Press.
- Moleong, J.Lexy. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nugroho, Iwan & Rochmin Dahuri. 2004. Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Jakarta: LP3ES
- Pasaribu, I.L. & Siamandjuntak, B. 1986. Sosiologi Pembangunan. Bandung: Tarsito.

Subarsono. 2006. Analisa Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suharno. 2010. Dasar-dasar Kebijakan Publik, kajian proses dan analisis kebijakan. Yogyakarta: UNY Press

Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfa Beta.

Wahab, Solichin Abdul. 2008. Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: PT Umi Aksara.

Peraturan Perundang-undangan:

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 3 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika di Kabupaten Cilacap

Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap nomor 22 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap

Laman

<http://Cilacapkab.bps.go.id/dokumen/digilib/2013/ip2013/files/assets/basic-html/page141.html>

<http://madpoel.wordpress.com/2010/03/20/globalisasi-dalam-bidang-ekonomi/>

<http://bayigalihnge.wordpress.com/2010/10/20/karl-marx-dan-sosialisme/>

<http://www.cilacapkab.go.id/v2/index.php?pilih=hal&id=3>

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Peta_administratif_jawa_tengah.gif

<http://Info.CILACAP.htm>

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Cilacap

<http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/07/sistem-pemerintahan-daerah.html>

[\(http://www.scribd.com/doc/213647392/Sistem-Pemerintahan-Daerah-Indonesia-Dalam-Era-Reformasi\)](http://www.scribd.com/doc/213647392/Sistem-Pemerintahan-Daerah-Indonesia-Dalam-Era-Reformasi)

([http://id.wikipedia.org/wiki /Otonomi_daerah](http://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah))

(<http://otonomidaerah.com/pengertian-otonomi-daerah/>)